

Dasar Ilmu Politik 13 X 20 Cm Miriam Budiardjo

Teori pembagian kekuasaan yang diuraikan dalam buku ini adalah ajaran trias politika dari Montesquieu dan John Locke, maupun Teori pembagian kekuasaan yang dikemukakan oleh van Vollen Hoven. Dalam buku ini juga menguraikan secara singkat tentang kekuasaan kehakiman dalam perspektif perbandingan yakni kekuasaan kehakiman di Belanda sebagai representasi dari negara-negara yang menganut konsep rechtsstaat dengan civil law system dan Amerika, sebagai negara penganut konsep the rule of law dengan common law system.

Buku ini berisi tentang dasar-dasar ilmu hukum seperti konsep, asas, dan norma-norma hukum sebagai pengenalan kepada para pemerhati atau pembelajar hukum yang baru kuliah, baik mahasiswa Fakultas Hukum, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, atau Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan, yang akan mendalami ilmu hukum sebagai sarana profesinya. Ada banyak sekali buku-buku tentang hukum seperti buku Pengantar Ilmu Hukum. Buku ini identic dengan buku Pengantar Ilmu Hukum, namun pembahasannya lebih luas dan beberapa perbedaan pemahaman selaras dengan paradigma hukum yang dianut oleh para pembaca buku ini, sekalipun tidak ada pembahasan khusus paradigma-paradigma hukum. Ada 3 paradigma yang menjadi sasaran pembahasan yaitu positivisme, historikisme, dan pluralism hukum. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup

Following the successful of previous conference, 3rd International Conference on Administrative Science, Policy, and Governance Studies (ICAS-PGS) in strategic alliance with 4th International Conference of Business Administration and Policy (ICBAP) 2019 will be held on October 30-31, 2019 in Universitas Indonesia, Depok, West Java, Indonesia. This year's conference theme is "Strengthening Strategic Administrative Reform Policy to Promote Competitiveness and Innovation in Industrial Revolution 4.0: The Opportunities and Challenges." This conference is hosted by Faculty of Administrative Science Universitas Indonesia (FIA UI). The conference covers debates over problematic situation, theoretical frameworks, as well as prescribed policies the way that governments, businesses, and civil societies essentially need to outline strategies to realize reform commitment and achieve change efficacy for purposes of harnessing innovation while considering the opportunities and challenges as well as maintaining sustainability, engaging in a more dynamic predicament such as regulatory frameworks that affect relations of multiple governance actors in today's dynamic towards Industrial Revolution 4.0. The main objective of this conference is to discuss and debate the recent trends in administrative science on a range of issues such as public, business, and fiscal and the interconnectedness of all in Industrial Revolution 4.0. This conference is aimed to bring researchers, academicians, scientists, policymakers, professional managers, students, and other related stakeholders; together to participate and

present their latest research findings, developments, and practical solutions related to the various aspects of administrative challenges in public and private sector. The general theme of 3rd ICAS-PGS and 4th ICBAP 2019 is "Strengthening Strategic Administrative Reform Policy to Promote Competitiveness and Innovation in Industrial Revolution 4.0: The Opportunities and Challenges." The conferences consist of three streams representing differences of focus and scopes of research interests within the discipline of public, business, and fiscal administration and policy. We convey our gratitude to our esteemed Committee, Speakers and Participants, for giving their best to the success of the conference

Buku ini membahas salah satu persoalan yang amat penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara, yang hingga kini tetap aktual dan tetap menarik perhatian banyak sarjana hukum terkemuka di berbagai bagian dunia. Masalah tersebut ialah masalah pendelegasian wewenang perundang-undangan (the problem of delegation of legislative power). Peraturan delegasi (delegated legislation), dewasa ini memegang peranan yang sangat penting dan bahkan cenderung terus berkembang dalam praktik di hampir semua negara hukum modern. Meskipun demikian, legitimasi demokratis peraturan delegasi masih menjadi perdebatan yang menarik hingga kini. Mengapa masalah ini menarik? Satu pendapat menyatakan, karena masalah tersebut menyangkut hubungan alat (organ) legislatif dengan alat eksekutif dalam kerangka ajaran pemisahan kekuasaan (trias politica) yang oleh banyak kalangan dipandang sebagai urat nadi pemerintahan demokratis dibawah faham "the rule of law". Pendelegasian wewenang perundang-undangan yang menimbulkan masalah politis konstitusional. Peraturan delegasi dewasa ini memegang peran yang sangat penting dan bahkan cenderung terus berkembang dalam praktik di hampir semua negara hukum modern. Fenomena "delegated legislations" sebagai peraturan pelaksana undang-undang atau "subordinate legislations" ini, diakui sangat penting di semua negara. Hampir tak ada negara yang tak membutuhkannya untuk menggerakkan pemerintahan. Peraturan delegasi merupakan keniscayaan yang dibutuhkan untuk menjalankan aturan yang lebih tinggi. Tanpa peraturan delegasi, bisa dipastikan pemerintahan akan berjalan lambat bahkan mandeg.

"Ketika berbicara tentang negara ideal, Al-Farabi menyatakan bahwa persyaratan penting yang harus dipenuhi oleh seorang penguasa, selain kemampuan berjihad, ialah kemampuan untuk melakukan jihad. Kedua kemampuan ini dapat menentukan substansi negara dan penguasanya." —Prof. Dr. Azyumardi Azra, Guru Besar Sejarah dan Peradaban Islam Fakultas Adab, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di antara wacana menarik dan kerap kali diperbincangkan dalam kehidupan sosial-politik ialah adanya keinginan mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang beradab. Sebuah tatanan masyarakat yang egaliter dan berkeadilan. Keinginan untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang ideal ini muncul seiring kesadaran manusia untuk hidup berkelompok, sehingga tercipta menjadi negara. Al-Farabi hadir sebagai salah satu yang tidak boleh dilewatkan dalam wacana pembangunan negara yang ideal. Bertolak dari kehidupan ideal di Madinah pada masa Rasulullah Saw., Al-Farabi mengusulkan al-Madinah al-Fadhilah dalam menyunggi kehendak dan cita-cita bersama. Baginya, negara yang

baik ialah negara yang dipimpin oleh seorang bijaksana yang terlepas dari ketergantungan pada dunia. Lantas, bagaimanakah penjelasan utuh al-Madinah al-Fadhilah yang dimaksud Al-Farabi? Bisakah bangsa Indonesia merefleksikan semangat alMadinah al-Fadhilah dalam konteks kekinian? Temukan jawabannya dalam buku ini.

Buku ini membahas modalitas yang dimiliki oleh calon bupati perempuan Indah Putri Indriani dalam kontestasi pemilukada di Luwu Utara dengan baik. Kontestasi pemilukada di Luwu Utara merupakan kontestasi incumbent pecah kongsi, di mana Indah Putri Indriani adalah wakil bupati incumbent yang berhadapan dengan bupati incumbent Arifin Junaidi. Tentu hal ini merupakan tantangan dan kontestasi yang berat bagi Indah Putri Indriani. Buku ini menceritakan secara rinci modalitas ekonomi, sosial, budaya dan politik yang dimiliki oleh Indah Putri Indriani sehingga mampu mengalahkan calon bupati incumbent. Paling tidak, ada 2 manfaat dari buku ini yaitu menambah pengetahuan kita tentang modalitas dalam kontestasi pemilukada, dan bahwa modalitas yang dimiliki oleh perempuan tidak lebih rendah dari laki-laki. Kemenangan perempuan dalam kontestasi pemilukada bukanlah sebuah keniscayaan.

A cumulative list of works represented by Library of Congress printed cards.

2004 local election in Jawa Barat Province, Indonesia.

Buku ini berisikan berbagai macam masalah hukum yang diulas dengan lugas sehingga dapat dipahami oleh pembaca dari berbagai kalangan. Prof. Emeritus. Dr. H. Lili Rasjidi, S.H., S.Sos., LL.M - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung. Ulasan dan pendekatan yang digunakan dalam book chapter ini akan menambah khazanah keilmuan bidang hukum yang terus-menerus mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Prof. Dr. Ade Saptomo, S.H., M.Si - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta. Buku ini sangat bermanfaat tidak hanya bagi pembaca dari kalangan bidang hukum tetapi juga masyarakat luas yang ingin mengetahui perkembangan, permasalahan dan penyelesaian hukum di Indonesia saat ini. Prof. Dr. H. Dudu Duswara M., Drs., S.H., M.Hum. - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, Bandung. Buku ini merupakan karya dari pemikiran dan analisis kritis dari dosen dan alumni Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam atas fenomena hukum yang terjadi di masyarakat dalam rangka Dies Natalis ke-20 Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Prof. Muhammad Hawin, S.H., LL.M., Ph.D - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Substansi tulisan pada buku ini menggambarkan percikan pikiran yang penuh optimisme, kaya gagasan ideal, inovatif dan tetap menjaga sikap kritis di tengah sistem hukum yang makin formalistik dan kultur penegakan hukum yang makin menjauh dari moralitas dan esensi keadilan. Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H. - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar

Secara etimologis politik berasal dari bahasa Yunani "polis" yang berarti kota yang berstatus negara. Secara umum istilah politik dapat diartikan berbagai macam kegiatan dalam suatu negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan itu. politik dapat diuraikan menjadi beberapa bagian yaitu negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijaksanaan umum dan pembagian atau alokasi, sedangkan konsep politik yang paling utama adalah negara. Ilmu politik merupakan ilmu yang mempelajari politik atau politics atau kepolitikan. Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Masalah politik yang sedang hangat di Indonesia saat ini adalah persiapan akan dihelatnya pemilihan umum presiden di tahun 2024 mendatang. Selama proses menuju pemilihan umum, terdapat tiga isu yang menjadi sorotan yaitu isu identitas, isu ekonomi

dan isu tenaga kerja. Masalah politik yang ada harus dicermati bagi tiap-tiap masyarakat untuk berusaha membuka wacana baru bahwa setiap pilihan dalam dunia politik pasti akan ada nilai positif dan negative, dan adapula beragam pilihan yang berbeda dengan pilihan kita.

Relationships between legislative and executive power of local governments in Indonesia after reinstated of the Indonesian 1945 Constitution in 1959.

This book presents the latest research on three issues of crucial importance to Asian cities: governance, livability, and sustainability. Together, these issues canvass the salient trends defining Asian urbanization and are explored through an eclectic compendium of studies that represent the many voices of this diverse region. Examining the processes and implications of Asian urbanization, the book interweaves practical cases with theories and empirical rigor while lending insight and complexity into the towering challenges of urban governance. The book targets a broad audience including thinkers, practitioners, and students.

We are delighted to introduce the proceedings of the first edition of Workshop Environmental Science, Society, and Technology. This Workshop has brought researchers, developers and practitioners around the world who are leveraging and developing of Environmental for Society and Technology for life. We strongly believe that Workshop Environmental Science, Society, and Technology provides a good forum for all researcher, developers and practitioners to discuss all science and technology aspects that are relevant to Digital Society. We also expect that the future Workshop will be as successful and stimulating, as indicated by the contributions presented in this volume.

Encyclopedia of cultural and heritage of Jakarta, Indonesia.

The theme of the conference is "Reconstructing Morals, Education, and Social Sciences for Achieving Sustainable Development Goals". This theme was formulated due to several considerations. First, the symptoms of moral decline that have the potential to destroy the nation. Morals guide humanity towards truth and civilization. The phenomenon of the dehumanization process in the industrial era that pushed people to be part of abstract societies tends to ignore humanity. The education process as a humanitarian system is increasingly marginalized, especially during discussions about the industrial revolution 4.0 and Society 5.0. The conference placed six sub-themes for speakers and participants to share ideas, namely: Social Sciences and Laws, History and Cultural Studies, Interdisciplinary Studies, Morals and Humanities, Policy, Politics, and Communication, Education. The committee has received 195 abstracts from prospective speakers. However, there are only 80 abstracts that are eligible to be presented at this conference.

Buku ini mengurai kembali ruang yang sudah diuraikan dan sebagian belum diuraikan dalam buku-buku Hukum Tata Negara yang ditulis oleh para pendahulu. Tentu sebagai suatu kajian, buku ini dapat dijadikan sebagai buku pegangan bagi mahasiswa, dosen, atau para peneliti dan ahli guna menambah wawasan dan pengetahuan di bidang ketatanegaraan. Buku persembahan penerbit Prenada Media Group.

ICSSSED 2020 The Proceedings of the 4th International Conference of Social Science and Education, ICSSSED 2020, August 4-5 2020, Yogyakarta, Indonesia European Alliance for Innovation

Comparative study between Prophet Muhammad's Constitution of Medina and the Indonesian Constitution of 1945.

[Copyright: 1bc6140087848bdaee68defeed598884](https://doi.org/10.1016/j.procs.2020.08.001)